

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi sudah menghasilkan berbagai pembaruan dalam kehidupan sosial, termasuk pada bidang akuntansi yang sekarang praktik akuntansi digunakan tidak bisa dimanfaatkan dalam organisasi berorientasi laba, namun serta pada organisasi nonlaba. Organisasi nonlaba adalah lembaga yang dibentuk bukan untuk meraih keuntungan, tetapi untuk membantu berbagai masalah atau aktivitas yang berkaitan dengan kepentingan umum tanpa tujuan usaha (Rahmawati et al., 2023).

Terdapat perbedaan karakteristik antara organisasi nonlaba dan organisasi bisnis (Fitri et al., 2023). Pertama, Sumber daya bermula dari donasi masyarakat yang diberikan tanpa menginginkan imbalan ekonomi. Kedua, surplus digunakan kembali untuk kegiatan organisasi bukan untuk dibagikan. Ketiga, kepemilikan tidak dapat diperjualbelikan dan tidak memberi klaim atas pendapatan atau aset saat likuidasi. Terdapat berbagai jenis organisasi nonlaba atau yang sering dinamai organisasi non-profit, antara lain sekolah yang dikelola pemerintah, kelompok sukarelawan, serta tempat ibadah contohnya masjid, gereja, dan vihara (Lating, 2022).

Di antara berbagai organisasi nonlaba, masjid menjadi suatu lembaga yang mempunyai kontribusi krusial bagi khalayak. Sebagai organisasi keagamaan, masjid memperoleh sumber pendanaan dari masyarakat dan tidak berorientasi pada keuntungan, melainkan berfokus pada penyediaan sarana serta fasilitas bagi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, dalam proses penghimpunan dan pengelolaan dana, dibutuhkan sistem akuntansi yang andal guna mewujudkan akuntabilitas. Masjid ini diharapkan mampu menyusun laporan keuangan yang ditunjukkan untuk semua pihak terkait, termasuk umat, rakyat luas, pemberi nasihat, pengurus, serta orang lain yang memerlukan informasi tersebut, sebagai wujud tanggung jawab atas pengelolaan keuangan (Ekaristi et al., 2024).

Dalam organisasi yang berorientasi nonlaba seperti masjid, akuntabilitas menjadi salah satu permasalahan yang sering muncul, terutama terkait dengan penyusunan laporan keuangan. Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan Informasi yang disajikan menunjukkan kondisi yang sesuai dengan keadaan sebenarnya (Prihatminingtyas et al., 2021). Permasalahan akuntabilitas umumnya muncul akibat kurangnya rasa tanggung jawab serta minimnya wawasan dari pihak yang memegang amanah. Selain itu, transparansi juga menjadi aspek penting dalam pengelolaan keuangan masjid. Adanya transparansi bertujuan untuk memastikan keterbukaan dalam pengelolaan laporan keuangan.

Kurangnya akuntabilitas dan transparansi dapat menimbulkan risiko penyalahgunaan dana, yang terbukti dalam beberapa kasus penggelapan dana masjid di Indonesia. Dikutip dari Detik (2023), seorang pengurus Masjid Al-Mujahid di Tanjungpinang, Kepulauan Riau, menggelapkan dana kurban jamaah sebesar Rp 51,2 juta, yang sebagian digunakan untuk kepentingan pribadi. Selain itu, menurut RMOL Jatim (2024), pengurus baru Masjid An-Nur Perum Green Hill Gresik menemukan ketidaksesuaian antara laporan kas dan saldo aktual, sehingga sekitar Rp 180 juta dana infak jamaah tidak dapat dipertanggungjawabkan karena laporan keuangan dari pengurus lama tidak lengkap dan tidak ada bukti transaksi yang memadai. selanjutnya, menurut Global News (2024), mantan Ketua Takmir Masjid As-Syuhadak di Sampang diduga menggelapkan dana dari dua rekening masjid senilai Rp 62 juta untuk kepentingan pribadi. Kasus-kasus tersebut sebagai pengingat mengenai kebutuhan untuk menerapkan asas akuntabilitas juga keterbukaan pada pengolahan keuangan masjid.

Untuk mencegah terulangnya kasus serupa, masjid harus menciptakan laporan keuangan dengan sistematis serta menyesuaikan standar akuntansi. Laporan keuangan yang mengikuti standar akuntansi keuangan yang sudah ada sanggup dianggap memiliki kejelasan dan kelayakan, serta memberikan manfaat yang lebih optimal untuk semua pengguna (Cempaka & Harahap, 2024). Pencatatan yang tertib memungkinkan pengurus mendokumentasikan seluruh penerimaan dan pengeluaran, memantau penggunaan dana, serta

menyajikan informasi kepada pihak internal maupun eksternal yang memerlukan data terkait keuangan. Laporan keuangan ini tidak sekedar bertugas guna tujuan administrasi, melainkan juga menjadi sarana pertanggungjawaban yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, masjid sebagai organisasi nonlaba sebaiknya mengikuti standar akuntansi yang sudah ditentukan di Indonesia. Pedoman yang relevan antara lain adalah Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) serta Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 35, perlu dicatat bahwa ISAK 35 telah diperbarui menjadi ISAK 335, yang mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2024. Pembaruan ini berkaitan dengan penyajian laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba. Kedua standar tersebut memberikan pedoman yang berguna bagi organisasi nonlaba dalam menyusun laporan keuangan yang berketerkaitan, andal, serta bisa dibedakan setiap periodenya pelaporan. Implementasi SAK EP dan ISAK 335 memungkinkan masjid menyajikan laporan keuangan lebih sistematis, sehingga mendukung pengelolaan dana yang bertanggung jawab dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pengurus.

Banyak penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa masih terdapat banyak organisasi nonlaba yang tidak mengikuti standar akuntansi dalam penyusunan laporan keuangannya. Penelitian oleh Siahaan et al. (2023)

menunjukkan bahwa pencatatan keuangan Masjid Al-Ihsan masih sederhana, yaitu hanya mencatat kas masuk serta kas keluar, menjadikan tidak sesuai dengan ketentuan ISAK 35. Berikutnya, penelitian yang dilakukan oleh Yudhanti & Margarita (2024) menegaskan jika pelaporan keuangan Masjid Jami' Darussalam masih sederhana akibat keterbatasan SDM dan kurangnya pemahaman standar akuntansi, sehingga akuntabilitas dan transparansi belum maksimal. Sementara itu, penelitian oleh Arthawan et al. (2025) mengungkapkan jika pencatatan keuangan pada Yayasan Taman Al Muhajirin 1407 sangat sederhana dan hanya mencatat kas masuk dan kas keluar, maka sebab itu penyajian laporan keuangan tidak cocok dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 335. Akibatnya laporan keuangan yayasan tidak dapat menjelaskan posisi keuangan sesungguhnya dari yayasan.

Hal yang sama juga terjadi pada Masjid Jami Nurul Yaqin, sebuah organisasi nonlaba di bidang keagamaan yang berlokasi di Jakarta Timur. Berdasarkan wawancara awal dengan pengurus masjid, diketahui bahwa dalam menjalankan kegiatan sehari-hari, masjid memperoleh dana dari masyarakat. Sumber penerimaan masjid meliputi donatur, kotak Jumat, kotak amal, program sedekah subuh, serta bantuan operasional tempat ibadah yang diberikan oleh Dewan Masjid Indonesia (DMI). Dengan adanya berbagai sumber dana tersebut, Masjid Jami Nurul Yaqin diharuskan untuk menyusun laporan keuangan menjadi wujud bertanggung jawab dari pengelolaan dana.

Namun, pencatatan laporan keuangan pada Masjid Jami Nurul Yaqin sejak awal berdirinya hingga ketika ini tetap dikerjakan dengan mudah, ialah hanya terbatas pada pencatatan penerimaan serta pengeluaran. Tak hanya itu, bukti transaksi untuk penerimaan dan pengeluaran belum tersimpan dengan rapi, karena beberapa pengeluaran tidak memiliki bukti fisik atau tidak disimpan secara teratur. Pelaporan mingguan juga kerap mengalami kesalahan dalam pencatatan jumlah uang dan ketidakteraturan penyajian data, sehingga berpotensi menurunkan transparansi serta kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana masjid.

Masjid ini juga memiliki berbagai aset selain kas, seperti peralatan dan bangunan masjid yang belum dicatat secara sistematis. Akibatnya, masyarakat dan donatur tidak mengetahui nilai maupun kondisi aset tersebut, sehingga berpotensi menimbulkan penyalahgunaan dana. Permasalahan ini terjadi karena keterbatasan pemahaman pengurus mengenai akuntansi, sehingga masjid belum dapat menyusun laporan keuangan secara tertata dan lengkap.

Berdasarkan fenomena dan permasalahan yang telah dijelaskan, peneliti berupaya membantu Masjid Jami Nurul Yaqin dalam merancang panduan penyusunan laporan keuangan agar ke depannya Masjid Jami Nurul Yaqin mampu menyusun laporan keuangannya dengan pribadi. Sehingga peneliti berminat dalam mengerjakan penelitian dengan judul **“Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan SAK EP dan ISAK 335 pada Masjid Jami Nurul Yaqin”**.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka pertanyaan penelitian yang dapat ditarik ialah seperti dibawah:

1. Bagaimana penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK EP dan ISAK 335 pada Masjid Jami Nurul Yaqin menggunakan Microsoft Excel ?
2. Bagaimana rancangan panduan penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK EP dan ISAK 335 pada Masjid Jami Nurul Yaqin?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pertanyaan penelitian tersebut, maka dari penelitian ini mendapatkan hasil yaitu:

1. Untuk menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK EP dan ISAK 335 pada Masjid Jami Nurul Yaqin menggunakan Microsoft Excel.
2. Untuk merancang panduan penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK EP dan ISAK 335 pada Masjid Jami Nurul Yaqin.

D. Manfaat Penelitian

Pada penelitian ini dimaksudkan memberikan manfaat untuk beberapa pihak, baik yang bersifat teoretis ataupun praktis adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan mampu menyumbangkan perspektif baru bagi ilmu pengetahuan, khususnya pada ranah akuntansi entitas nonlaba, sekaligus memperkuat penerapan Model *Analysis, Design, Development, Implementation, and Evaluation* (ADDIE) sebagai salah satu metode dalam proses penyusunan laporan keuangan. Diharapkan bahwa temuan penelitian ini juga bisa dimanfaatkan menjadi referensi oleh penelitian yang dimasa depan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pengurus Masjid Jami Nurul Yaqin

Penelitian ini diharapkan memberikan panduan bagi pengurus masjid dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAK EP dan ISAK 335 sehingga pengelolaan keuangan dapat dilakukan secara lebih sistematis, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan.

b. Bagi Pengurus Masjid di Indonesia

Penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan nilai sebagai panduan bagi masjid lainnya dalam melakukan penyusunan laporan

keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, menambahkan kualitas laporan keuangan dan kepercayaan masyarakat dapat mengalami peningkatan.

c. Bagi Pemerintah dan Lembaga Terkait

Penelitian ini diharapkan bisa mengusulkan masukan teruntuk pemerintah, Dewan Masjid Indonesia (DMI), dan lembaga pembina organisasi keagamaan dalam penyusunan panduan atau kebijakan pelaporan keuangan masjid serta mendukung pembinaan dan pengawasan dana sosial dan keagamaan.

d. Bagi Jamaah dan Donatur Masjid

Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan keterbukaan serta kepercayaan jamaah maupun donatur terhadap pengelolaan dana melalui laporan keuangan yang jelas, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan.